

Strategi Pengembangan Perikanan Tangkap di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

Capture Fisheries Development Strategy in Kaimana District, Kaimana,
West Papua Province

¹Muh. Fauzan Farauzhi Pical, ²Ernawati Hendrakususmah

^{1,2}*Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.
1 Bandung 40116*

e-mail: ¹farauzhipical@gmail.com, ²erkoes18@gmail.com

Abstract. In the Marine and Fisheries No. KEP.39 / MEN / 2011 on amendments to the Decree of the Minister of Marine and Fisheries No.KEP.32 / MEN / 2010 on Stipulation Minapolitan Region there are 197 District / City are designated as development areas Minapolitan Region. The coastal area Kaimana district is one of the areas of Kaimana regency which has the potential of marine resources for business development in the field of fisheries (aquaculture and capture). However, the development of fisheries and marine capture fisheries especially in Kaimana district in general and particularly in Kaimana district appeared to be not serious by local governments. It needs a good strategy for the development of fisheries as a form of efforts to maximize the potential of marine natural resources in Kaimana district. Based on the results of SWOT analysis, the right strategy is applied to the development of fisheries in Kaimana district is a strategy of using all opportunities to minimize the weaknesses that exist there (Weakness - Opportunity). The resulting formulation strategies are strategies that is based on variables integral to capture fisheries development include policy support, production facilities, fishing ports, processing units, marketing units, institutional existence until the basic infrastructure as supporting capture fisheries development.

Keywords: Strategy, Minapolitan, Fishing, Infrastructure, Production, Processing, Marketing, Policy.

Abstrak. Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.39/MEN/2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan terdapat 197 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daerah pengembangan Kawasan Minapolitan. Wilayah pesisir Distrik Kaimana adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Kaimana yang memiliki potensi sumber daya perairan untuk pengembangan usaha di bidang perikanan (budidaya dan tangkap). Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya perairan pantai di wilayah Distrik Kaimana diarahkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya secara efektif, efisien, optimal dan berkelanjutan. Namun pengembangan perikanan dan kelautan di Kabupaten Kaimana umumnya dan khususnya di Distrik Kaimana tampak belum serius dilakukan oleh pemerintah daerah. Diperlukan sebuah strategi yang baik untuk pengembangan perikanan tangkap sebagai bentuk dari upaya memaksimalkan potensi sumberdaya alam kelautan di distrik kaimana. Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka strategi yang tepat diterapkan pada upaya pengembangan perikanan tangkap di Distrik Kaimana adalah strategi dengan menggunakan semua peluang yang ada untuk meminimalisir berbagai kelemahan yang ada yang ada (*Weakness – Opportunity*). Formulasi strategi yang dihasilkan adalah strategi-strategi yang disusun berdasarkan variable-variabel penting dala pengembangan perikanan tangkap meliputi dukungan kebijakan, sarana produksi, pelabuhan perikanan, unit pengolahan, unit pemasaran, keberadaan kelembangaan hingga pada infrastruktur dasar sebagai penunjang pengembangan.

Kata Kunci : Strategi, Minapolitan, Perikanan Tangkap, Sarana Prasarana, Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Kebijakan.

A. Latar Belakang

Sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.39/MEN/2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan terdapat 197 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daerah pengembangan Kawasan Minapolitan. Di Provinsi Papua Barat terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan, dan salah satunya adalah Kabupaten Kaimana. Dengan melihat berbagai kebijakan tentang pengembangan minapolitan yang ditinjau mulai dari kebijakan dalam skala nasional, provinsi hingga pada kebijakan daerah kabupaten, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kaimana dapat dikatakan telah didukung untuk dikembangkan menjadi salah satu lokus pengembangan kegiatan minapolitan di Papua Barat padakhususnya dan Indonesia pada umumnya. Wilayah pesisir Distrik Kaimana adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Kaimana yang memiliki potensi sumber daya perairan untuk pengembangan usaha di bidang perikanan tangkap khususnya perikanan tangkap.

Dari hasil observasi dan studi literatur, Peneliti menyimpulkan bahwa sumber utama permasalahan pengembangan kawasan minapolitan pada umumnya dan khususnya untuk perikanan tangkap di Distrik Kaimana adalah kurang efektifnya upaya pengembangan yang digunakan saat ini. Strategi pengembangan yang digunakan saat ini dianggap oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat pesisir atau nelayan hanya menguntungkan sebelah pihak semata. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya pemerintah dalam menciptakan usaha-usaha yang mengarah pada pemberdayaan kepada masyarakat setempat. Karakteristik kegiatan perikanan dan kelautan masyarakat pun terlihat masih sangat sederhana atau tradisional. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh jenis armada sampan (perahu tanpa motor) dan perahu motor tempel serta alat tangkap yang relatif masih tradisional yang didominasi oleh Tonda (memancing mengikuti aliran arus air), ditambah lagi dengan jumlah nelayan yang lebih didominasi oleh nelayan sambilan tambahan sehingga upaya untuk meningkatkan produksi penangkapan masih sangat sedikit dan bergerak sangat lambat.

Melihat potensi perikanan dan kelautan Distrik Kaimana dan dikaitkan dengan upaya pengembangannya, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah belum menemukan strategi pengembangan yang baik sehingga kurang membawa hasil yang optimal. Maka pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan perikanan tangkap perlu merancang strategi yang baik untuk mencapai target-target yang diharapkan kedepannya. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka Peneliti menetapkan judul penelitian mengenai strategi pengembangan perikanan tangkap di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana.

B. Landasan Teori

1. Teori Strategi.

Berdasarkan hasil kajian teoritis terhadap beberapa definisi tentang strategi diatas, dapat disimpulkan secara garis besar bahwa strategi merupakan cara atau pola sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh suatu kelompok, organisasi atau perusahaan

2. Teori Manajemen Strategis.

Secara garis besar manajemen strategis merupakan sebuah upaya atau

proses yang dilakukan suatu organisasi untuk mempertahankan keberlangsungan dan untuk memperoleh pencapaian tujuan organisasi dengan melakukan berbagai tahapan-tahapan berupa perencanaan strategi serta pengimplementasian berbagai strategi.

3. Teori Minapolitan

Secara bahasa minapolitan terdiri dari dua kata, yakni “*Mina*” yang artinya ikan atau perikanan dan “*Politan*” yang artinya kota, jadi minapolitan adalah kota perikanan. Di dalam Pedoman Pengembangan Kawasan Minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011 Kawasan Minapolitan berdasarkan turunan kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis.

4. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap merupakan suatu sistem, yang terdiri atas beberapa elemen atau subsistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan lainnya adalah

- a. Dukungan Kebijakan Pengembangan
- b. Sarana produksi
- c. Usaha penangkapan
- d. Usaha penangkapan
- e. Prasarana Pelabuhan Perikanan
- f. Unit/kegiatan pengolahan
- g. Unit/kegiatan pemasaran
- h. Keberadaan Kelembagaan
- i. Infrastruktur dasar sebagai penunjang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Dukungan atau Kesesuaian Kebijakan Pengembangan Perikanan Tangkap Di Distrik Kaimana

Tinjauan dukungan dan kesesuaian dukungan kebijakan pengembangan dilakukan dengan meninjau dukungan dan kesesuaian dukungan kebijakan dari skala nasional hingga ke daerah. Hasil pengamatan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.39/MEN/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan terdapat 197 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai daerah pengembangan Kawasan Minapolitan. Di Provinsi Papua Baratterdapat 3 (tiga) Kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan, dan salah satunya adalah Kabupaten Kaimana. Disamping itu, di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan PP No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional juga disebutkan bahwa penetapan kawasan andalan laut provinsi Papua Barat yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kabupaten Kaimana termasuk salah satu Kawasan Andalan Laut di Provinsi Papua Barat dengan sektor unggulan perikanan, industri, perkebunan, peternakan, pertanian tanaman pangan ,

dan pertambangan.

- b. Jika ditinjau dari struktur ruang wilayah Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat disusun menjadi 4 SWP (Satuan Wilayah Pengembangan). Kabupaten Kaimana termasuk ke dalam SWP 4 yang diarahkan pada fungsi industri, perikanan tangkap dan kehutanan.
 - c. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaimana, Kabupaten Kaimana terbagi kedalam 5 (lima) Wilayah Pembangunan (WP). Untuk wilayah pengembangan Kaimana dengan pusat pengembangannya adalah Distrik Kaimana yang melayani Tanggaromi sampai dengan Lobo. Salah satu kegiatan yang mendominasi pada wilayah pengembangan ini adalah kegiatan: Perikanan tangkap dan budidaya laut
- Dengan melihat berbagai kebijakan tentang pengembangan minapolitan yang ditinjau mulai dari kebijakan dalam skala nasional, provinsi hingga pada kebijakan daerah kabupaten, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kaimana, khususnya Distrik Kaimana dapat dikatakan telah didukung untuk dikembangkan menjadi salah satu lokus pengembangan kegiatan minapolitan perikanan tangkap di Kabupaten Kaimana.
2. Perumusan Karakteristik Perikanan Tangkap Di Distrik Kaimana

Berdasarkan studi literatur, diketahui bahwa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan perikanan tangkap. Hal-hal tersebut yang dijadikan variabel dalam menentukan karakteristik perikanan tangkap, yakni dukungan kebijakan, sarana produksi, usaha penangkapan, pelabuhan perikanan, unit pengolahan, unit pemasaran, kelembagaan, dan dukungan infrastruktur dasar sebagai penunjang. Variabel-variabel ini disesuaikan dengan kondisi ekstisting perikanan tangkap Distrik Kaimana untuk menyusun karakteristik perikanan tangkap Distrik Kaimana
 3. Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS)

Setelah mengidentifikasi karakteristik perikanan tangkap Distrik Kaimana, selanjutnya dilakukan analisis faktor strategis internal (IFAS) untuk menentukan kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) pengembangan perikanan tangkap distrik kaimana. Setelah melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan selanjutnya dilakukan pembobotan dan penilaian. Hasilnya diketahui bahwa jumlah kekuatan (*Strengths*) adalah 1,362 dan jumlah faktor kelemahan (*Weakness*) adalah 1,470.
 4. Analisis Faktor Strategis Internal (IFAS)

Setelah mengidentifikasi karakteristik perikanan tangkap Distrik Kaimana, selanjutnya dilakukan analisis faktor strategis eksternal (EFAS) untuk menentukan peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Treatment*) pengembangan perikanan tangkap distrik kaimana. Setelah melakukan identifikasi peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Treatment*) selanjutnya dilakukan pembobotan dan penilaian. Hasilnya diketahui bahwa jumlah peluang (*Opportunity*) adalah 1,506 dan jumlah faktor ancaman (*Treatment*) adalah 1,416.

5. Analisis Matriks Space SWOT

Tabel 2. Total Skor Faktor Strategis Internal (kekuatan dan kelemahan) serta Faktor Strategis Eksternal (peluang dan ancaman)

Faktor Internal (IFAS)	
Kekuatan (<i>Strenght</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1.362	1.470
Faktor Eksternal (EFAS)	
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Treatment</i>)
1.506	1.416

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Dari hasil total skor faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor strategis eksternal (peluang dan ancaman) diatas dapat dilihat bahwa skor yang didapat dari hasil perhitungan IFAS adalah $S = 1,362$ dan $W = 1,470$. Sedangkan skor total EFAS adalah $O = 1,506$ dan $T = 1,416$. Dengan demikian kesimpulan akhir yang dapat diambil adalah bahwa analisis SWOT menunjukkan hasil yang termasuk dalam kategori $S < W$ dan $O > T$. Distrik Kaimana terletak di Kuadran III yang berarti bahwa strategi yang paling tepat untuk digunakan dalam pengembangan minapolitan perikanan tangkap di Distrik Kaimana yang adalah bentuk strategi *Turn Around* atau strategi *Weakness – Opportunity* (SO), yakni strategi yang menunjukkan bahwa posisi pengembangan perikanan tangkap Distrik Kaimana berada dalam situasi yang cukup baik karena memiliki peluang yang besar namun masih memiliki banyak kelemahan.



Gambar 1. Posisi Kuadrant SWOT Dalam Penentuan Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana

Sumber : Hasil Analisis, 2016; Bagan Menurut Freddy Rangkuti, 2009

D. Kesimpulan

Formulasi strategi terhadap pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di Distrik Kaimana adalah sebagai berikut.

1. Dukungan/kesesuaian kebijakan pengembangan.
 - Menyelesaikan proses legalitas terhadap Rencana Induk (*master plan*) Minapolitan Kabupaten Kaimana yang telah disusun semenjak tahun 2011.
2. Kegiatan/Unit Produksi
 - a. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan nelayan agar peningkatan produktifitas penangkapan dapat tercapai.
 - b. Melakukan ekspansi wilayah penangkapan yang lebih luas pada laut arafuru dan WPPNRI 718 yang memiliki potensi hasil tangkapan yang sangat besar agar peningkatan produksi perikanan tangkap dapat terjadi secara maksimal
 - c. Sosialisasi pemerintah Kabupaten Kaimana kepada masyarakat (nelayan) tentang potensi dan nilai komoditas unggulan yang dimiliki di desa-desa yang sangat jarang terjangkau oleh kegiatan sosialisasi (Desa Tanggaromi, Desa Kamaka, Desa Sarimai dan Desa Maimai
3. Usaha Penangkapan
 - a. Pengadaan alat tangkap yang lebih modern untuk mendukung produktifitas penangkapan yang maksimal
 - b. Melakukan sosialisasi pengenalan jenis alat tangkap modern dan melakukan pendampingan secara rutin kepada masyarakat, terutama di desa-desa di wilayah timur Distrik Kaimana (Desa Mai-mai hingga Desa Kamaka).
 - c. Melakukan restrukturisasi terhadap armada kapal yang aktif beroperasi agar memiliki palka (ruang penyimpanan dan ruang pendingin) dan menggunakan GPS untuk menopang produktifitas dan kualitas hasil tangkapan ketika kapal beroperasi/berlayar melakukan penangkapan (semua desa)
 - d. Bekerja sama dengan masyarakat dalam mengawasi daerah penangkapan dengan memanfaatkan budaya lokal yang masih sangat kental dalam menjaga laut untuk menghindari eksploitasi ikan dengan cara illegal dan berlebihan, khususnya di wilayah teluk sisir.
4. Pelabuhan Perikanan
 - a. Menyelesaikan pembangunan dan rehabilitasi PPI di Desa Coa
 - b. Memelihara dan meningkatkan kualitas dermaga-dermaga lokal yang aktif beroperasi di Desa Tanggaromi, Desa Sisir, Desa Namatota, Desa Lobo dan Desa Kamaka.
5. Kegiatan/unit pengolahan
 - a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan ikan dalam bentuk olahan yang lebih beragam untuk mendukung pengembangan minabisnis di Distrik Kaimana.
 - b. Meningkatkan kualitas unit-unit pengolahan yang sudah ada (desa Kroy,

- Desa Trikora, Desa Kaimana,).
- c. Membangun unit-unit pengolahan di Desa Namatota untuk mendukung kegiatan pengolahan di wilayah timur Distrik Kaimana.
6. Kegiatan/unit Pemasaran.
 - a. Meningkatkan kualitas pasar ikan distrik
 - b. Peningkatan akses pasar, akses permodalan dan rantai tata niaga yang berpihak kepada kepentingan nelayan
 - c. Aktif dalam meningkatkan jumlah sumber permodalan bagi nelayan dan pelaku bisnis perikanan khususnya di Desa Kaiman, Desa Kroy, Desa Trikora untuk memicu perkembangan pemasaran hasil tangkapan.
 - d. Sosialisasi di setiap desa tentang peluang pengembangan minabisnis.
 7. Kelembagaan
 - a. Tegas dalam mengaktifkan kembali lembaga-lembaga koperasi yang menopang permodalan nelayan.
 - b. Membentuk struktur organisasi kelompok nelayan di setiap desa mengingat setiap distrik belum ada kelompok-kelompok nelayan secara formal.
 - c. Perluasan akses jejaring sosial kelompok nelayan dengan pihak luar.
 - d. Melakukan kegiatan penyuluhan, sosialisasi hingga pendampingan secara rutin di setiap desa pesisir, terutama di desa Sisir hingga Desa Kamaka.
 - e. Melanjutkan dan mengawasi program pembentukan POKMASWAS (kelompok pengawas masyarakat) di setiap Desa
 - f. Melakukan konsultasi, pertemuan berkala antar *stakeholder* dalam memantau, mengkaji ulang dan mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis hingga pada proses legalisasi perencanaan rencana induk (*masterplan*) minapolitan Kabupaten Kaimana.
 - g. Membentuk pusat data spasial kabupaten yang memadukan, memutakhirkan dan mendistribusikan bentuk data dan informasi wilayah pesisir dan laut secara cepat dan efisien
 - h. Menerbitkan katalog data dan informasi wilayah pesisir dan laut dalam berbagai bentuk secara regular
 8. Infrastruktur Dasar Sebagai Penunjang.
 - a. Membangun akses jalan darat (jalan kabupaten/Arteri) yang menghubungkan Desa wilayah timur distrik (Desa Maimai, Desa Saria, Desa Lobo, Desa Kamaka) dengan pusat kegiatan (ibukota kabupaten) yang terpusat Di Desa Kaimana.
 - b. Peningkatan kualitas jalan masuk PPI
 - c. Peningkatan Kualitas jalan kabupaten di desa Sisie, Desa Murano dan Desa Fromajaya (hotmix)
 - d. Peningkatan kualitas jalan desa di setiap desa Distrik Kaimana.

Daftar Pustaka

- BAPPEDA Kabupaten Kaimana. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaimana. Kaimana ; 2014
- BAPPEDA Kabupaten Kaimana. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaimana. Kaimana : 2014
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kaimana. Dokumen penyusunan Masterplan Minapolitan

Kabupaten Kaimana. Kaimana; 2014

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.39/MEN/2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Jakarta :2012
- Akhmad Fauzi, Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Marta dwiprani hesti, 2011. Pengembangan Wilayah Pesisir Melalui Konsep Minapolitan
- Dahuri. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. PT Pradya Paramitha. Jakarta.
- Riyadi, dkk. 2003. Kebijakan, Perencanaan Pembangunan nasional Bidang Sumberdaya Laut dan Pesisir Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Era Otonomi Daerah. Menteri Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Jakarta. Tanggal 26 Februari. 2003.
- Widodo, dkk. 2006. Sistem Perikanan . Rajawali Press. Jakarta.
- Bengen, D. G. 2002. Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Lautan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Bogor.
- Harahap, R.Hamdani. 2002. Kajian Akademik Peraturan Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan. Makalah, Medan, Sumatera Utara.
- Rokhimin D,1999, Prosiding : Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Kerjasama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dengan Coastal Resources Management Project (CRMP/CRC-URI). Jakarta.